

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama tahun 1970-an, Australia adalah pionir kebijakan perempuan. Semenjak Anthony Albanese terpilih sebagai Perdana Menteri Australia tahun 2022 yang lalu, isu gender diangkat menjadi agenda pembenahan pemerintahan Australia. Tidak perhatiannya pemerintah terhadap isu perempuan seperti pelecehan seksual dan ekonomi perempuan adalah faktor kabinet Albanese mengangkat issue gender dalam pemerintahannya (Biddle & Gray, 2022). Gender merupakan factor penting dalam pembentukan ekonomi, pemerintahan, dan stabilitas negara negara di seluruh dunia. Albanese dan kabinetnya memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi kesetaraan gender di Australia dan negara mitra (Position et al., 2021).

Australia memiliki stereotip tradisional terkait perempuan menjadi penghambat dalam politik. Hal ini lantas ditentang oleh para birokrat feminis atau yang disebut femokrat (Porter, 2016). Isu pemungutan suara perempuan telah muncul pada awal 1900-an hingga akhirnya di tahun 1943 perempuan pun dapat duduk di parlemen. Sejak saat itu pemerintah berjuang untuk menyeimbangkan status persamaan gender baik dalam kehidupan public maupun politik. Perempuan dalam parlemen diharapkan dapat membawa perubahan dalam perwakilan. Tetapi pada kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam parlemen masih jauh dari ramah perempuan. Isu ini membuat partai Buruh Australia untuk menerapkan kebijakan kuota perempuan (Kusuma Putri, 2015). Kuota perempuan dalam parlemen merupakan proses dimana adanya pencadangan sejumlah kursi di parlemen khusus untuk perempuan. Sistem daripada kuota parlemen ini adalah mencadangkan kursi yang ada di parlemen, misalnya 30% jumlah kursi parlemen akan didistribusikan kepada partai politik yang ada sesuai dengan

perolehan suara masing masing partai dalam pemilu (Azizah, 2014). Partai Buruh Australia menerapkan kebijakan kuota perempuan dalam struktur parpolnya pada tahun 1994, tentu saja langkah tersebut memberikan banyak perubahan pada perempuan untuk berpartisipasi sebagai pengambil keputusan. (Kusuma Putri, 2015)

Australia telah menyelenggarakan pemilunya yang ke-47 pada tanggal 21 Mei 2022. PM sebelumnya, Scott Morrison dari partai liberal turut mencalonkan Kembali sebagai PM ke-47. Anthony Albanese yang berasal dari partai buruh terpilih menjadi Perdana Menteri terpilih Australia (Murphy & Hurst, 2022). Kekalahan partai liberal dalam pemilu kali ini dikarenakan adanya kelalaian Scott Morrison dalam memimpin Australia dalam tiga tahun terakhir, seperti kabur saat terjadinya kebakaran hebat Australia di tahun 2019, tidak memerhatikan iklim, kelalaian dalam program vaksinasi COVID-19 (CHAIN, 2022), dan puncaknya pada kasus perkosaan Brittany Higgins di kantor Menteri Industri Pertahanan Senator Linda Reynolds di sayap Menteri Gedung Parlemen (Murphy & Hurst, 2022). Pada kampanyenya, Partai Buruh banyak mengkampanyekan tentang “*Rebuilding Australia*”. Salah satu kampanyenya adalah aksi pro-perempuan. Langkah tersebut memberikan banyak perubahan pada perempuan untuk berpartisipasi sebagai pengambil keputusan dan menyejahterakan kehidupan perempuan Australia (*Vote for a Better Future*, 2022). Pasca dipilihnya Albanese sebagai PM Australia, Kabinet Albanese menerapkan kebijakan luar dan dalam negeri ramah perempuan untuk membangun kembali image Australia yang ramah gender (Position et al., 2021)

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana Kabinet Albanese merespon tuntutan problematika kesetaraan Gender di Australia?”

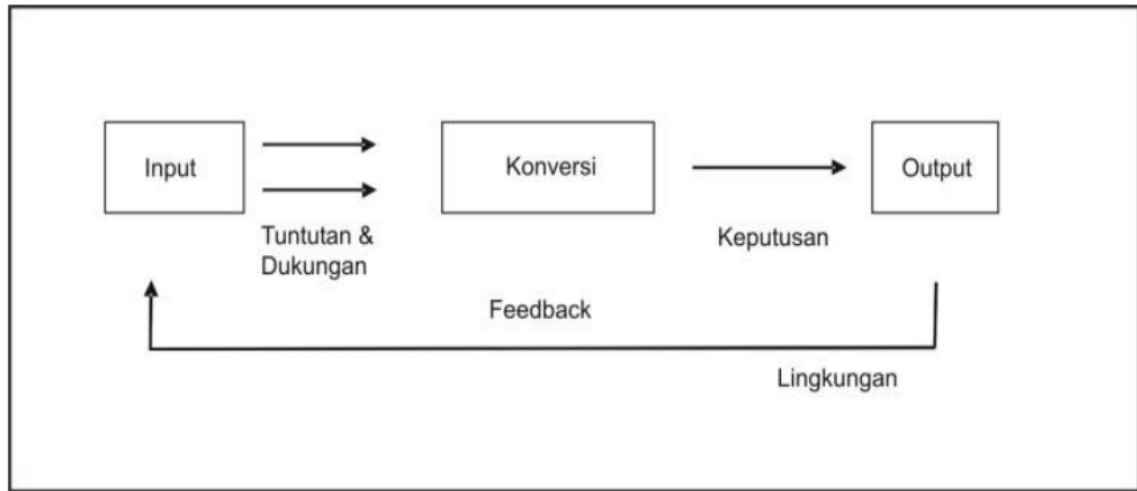
1.3 Kerangka Pemikiran

A. Model Sistem Politik oleh David Easton

Model Sistem Politik oleh David Easton merupakan suatu system interaksi dalam setiap lapisan masyarakat dengan tujuan diimplementasikan masyarakat dengan sifat otoritatif atau mengikat (Varma, 1992). Sistem politik adalah system social dengan ciri tertentu. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari Tindakan politik sebagai Tindakan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan public. Perbedaan tersebut dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu identifikasi system politik dengan memperhatikan unit system politik sehingga dapat membedakan dengan system social yang lainnya. Kedua adalah input dan output. Ketiga adalah diferensiasi system politik, misal adanya perbedaan peran Tindakan politik, yaitu legislative, eksekutif, yidkatif, dan partai politik. Keempat adalah integrasi dalam system. Yaitu usaha untuk mengatur kekuatan dan kegiatan dalam system politik (Pribadi et al., 2017).

Berikut adalah gambar dari alur Sistem Politik ala David Easton:

Gambar 1.1 Alur Sistem Politik ala David Easton



Sumber Gambar: (Priyadi et al., 2017)

Menurut Easton, kerja suatu sistem politik dipengaruhi oleh: input dan output dalam sistem politik, lingkungan dalam sistem politik. Input merupakan tuntutan (demands) dan dukungan (support) yang kemudian diteruskan dengan konversi untuk mendapatkan sebuah output. Output berarti adalah keputusan atau kebijaksanaan. Konversi merupakan proses yang tidak banyak diketahui oleh public, beda dengan input, yang diliputi oleh tuntutan dan dukungan public. Setelah output atau hasil keputusan konversi diterbitkan, maka timbulah umpan balik (feedback) melalui lingkungan yang kemudian akan kembali mempengaruhi input (system berulang)

Problematika ketidaksetaraan gender di Australia dapat dianalisis melalui model system politik ala David Easton. Dengan mengacu pada bagan Alur Sistem Politik diatas, maka alur input-output dapat dijelaskan sebagai berikut:

Australia telah mengalami penurunan kesetaraan gender pada 3 tahun belakangan, yaitu pada tahun 2019-2022. Ketidaksetaraan ini membuat masyarakat

ragu akan kepemimpinan saat itu, yaitu PM Scott Morison. Kemudian pada tahun 2022, terpilihlah PM yang baru, yaitu Anthony Albanese yang berusaha untuk membangun image Australia Kembali yang ramah perempuan. Untuk mengatasi problematika kesetaraan gender tersebut, maka kabinet Albanese menerapkan strategi politik kesetaraan gender nasional. Strategi tersebut adalah menerapkan kebijakan yang ramah bagi perempuan (*women friendly policy*).

Women Friendly Policy merupakan kebijakan public yang diperuntukkan untuk warga negara, dimana kebijakan tersebut adalah kebijakan yang mengakomodir kebutuhan gender yang dimiliki perempuan (Borchorst & Siim, 2008). Menurut Molyneux (1985), kebutuhan gender dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan gender strategis (*strategic gender needs/SGNs*) dan kebutuhan gender praktis (*practical gender needs/PGNs*). SGNs merupakan kebutuhan yang dilakukan untuk menuntaskan problem subordinasi perempuan oleh laki laki. Contohnya adalah; penghilangan sistem pembagian kerja berdasarkan sex, pengurangan beban perempuan untuk menanggung pekerjaan domestik serta merawat anak, penghilangan diskriminasi kepemilikan hak tanah, harta benda, dan akses kredit, adanya kesetaraan hak politik, Jaminan perempuan tidak berada dibawah control laki laki serta bebas kekerasan seksual. Sedangkan PGNs merupakan kebutuhan yang dirumuskan dari kondisi konkrit perempuan sehubungan dengan pembagian kerja berdasar jenis kelamin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan gender praktis maka harus memiliki kebijakan yang fokus pada arena domestic misalnya; kebutuhan untuk mendongkrak ekonomi perempuan miskin, kebutuhan akan perumahan, air, makanan, vaksinasi anak, dan lain sebagainya (Azizah, 2017).

Untuk mendukung terwujudnya kebutuhan gender yang praktis dan strategis, maka agenda politik dari pemerintah yang ramah perempuan diperlukan untuk mewujudkan konstruksi sosial ranah public sehingga kaum perempuan tidak terpinggirkan. Tindakan afirmatif merupakan salah satu tindakan untuk mengatasi dampak diskriminasi perempuan serta dapat mempromosikan kesempatan perempuan terlibat dalam dunia kerja secara adil. Tindakan afirmatif merupakan program penyetaraan kelompok yang dirugikan, sehingga terciptalah kesetaraan gender (Tobirin et al., 2018).

Kabinet Albanese memiliki 2 strategi untuk menciptakan Australia yang ramah perempuan. Strategi tersebut terdiri dari kebijakan luar dan dalam negeri. Pada kebijakan luar negerinya, pemerintahan Albanese telah memberlakukan kebijakan luar negeri yang tertuang pada *Foreign Policy White Paper* milik *Department of Foreign Affairs and Trade's*, salah satunya adalah penunjukan Stephannie Copus-Campbell sebagai duta besar Australia untuk kesetaraan gender, perluasan kepemimpinan perempuan di Papua Nugini, dan program Indo-Pacific Health Security yang bertujuan untuk membantu masalah Kesehatan dan reproduksi yang dikhususkan bagi Wanita dan anak-anak di Kawasan Asia-Pasifik. (Position et al., 2021). Adopsi kebijakan luar negeri ini berasal dari konsep *Feminist Foreign Policy* yang diluncurkan di Swedia pada tahun 2014 oleh Margot Walstrom, Menteri luar negeri Swedia saat itu.

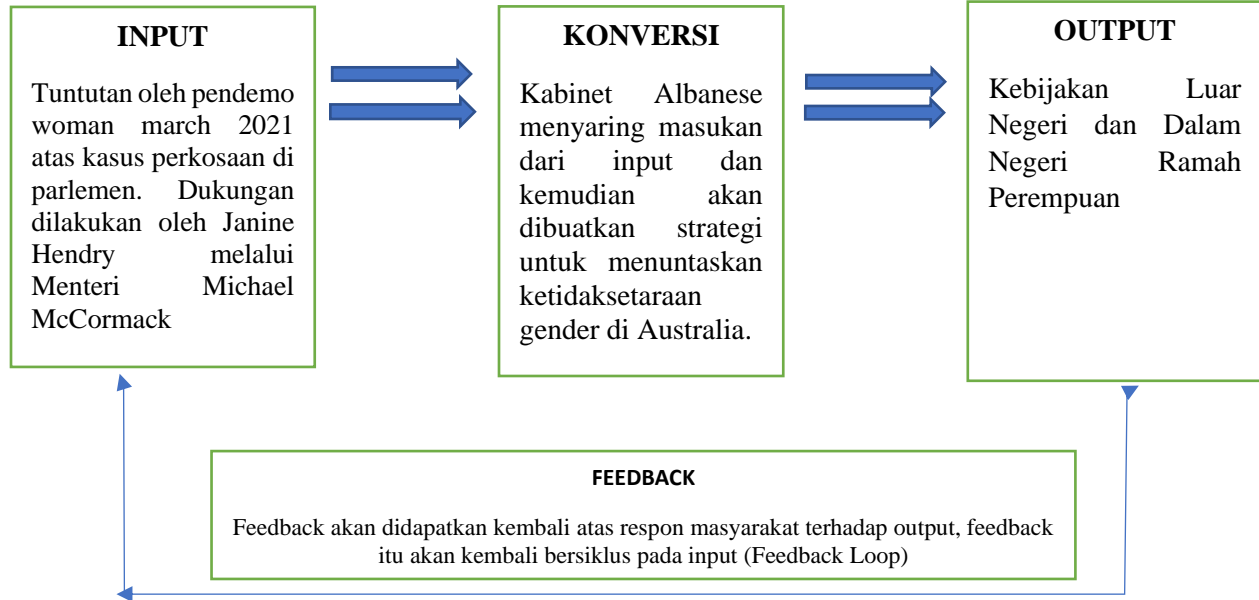
Feminist Foreign Policy atau Kebijakan Luar Negeri Feminis adalah kebijakan suatu negara yang mendefinisikan interaksi dengan negara dan gerakan lain dengan cara memprioritaskan kesetaraan gender dan menjunjung hak asasi perempuan dan kelompok yang secara tradisional terpinggirkan, mengalokasikan sumber daya yang

signifikan untuk mencapai visi tersebut, dan melalui implementasinya berupaya untuk mengganggu struktur kekuasaan patriarkal dan dominasi laki-laki di semua pengaruhnya (bantuan, perdagangan, pertahanan, dan diplomasi), yang diinformasikan oleh suara aktivis, kelompok, dan gerakan feminis. (Thompson & Clement, 2018).

Pada kebijakan dalam negerinya Albanese memperkenalkan program *Cheaper Childcare Policy*, yaitu program Peningkatan Pengasuhan Anak Keluarga Pekerja yang ditujukan untuk memotong biaya penitipan anak, salah satu kebijakannya adalah meningkatkan tingkat subsidi penitipan anak dan menguranginya untuk setiap keluarga yang berpenghasilan kurang dari \$530.000 sehingga menjadikannya hemat 97 persen dari semua keluarga (menghemat \$600 hingga \$2.900 setahun) (*Cheaper Child Care*, 2022). Kemudian Albanese juga menunjuk sepuluh wanita untuk turut bekerja sama dalam kabinetnya. Hal ini dilakukan karena untuk menunjang representasi wanita agar turut bisa memformulasikan *affirmative action* untuk menyokong program kesetaraan gender di Australia (ABC, 2022). Kemudian Albanese juga membentuk Gugus Tugas Kesetaraan Ekonomi Wanita atau *Women Economic Equality Taskforce* (WEET). WEET akan membahas tentang komitmen pemilu untuk membahas masalah yang dihadapi wanita dalam perekonomian Australia. Kathy Gallagher sebagai Menteri keuangan, Menteri pelayanan public, dan Menteri perempuan Australia saat ini mengatakan bahwa WEET akan menjadi penasihat pemerintah dalam berbagai isu terkait mendorong kesetaraan perempuan sebagai keharusan ekonomi, termasuk melalui Strategi Kesetaraan Gender Nasional dan Buku Putih Ketenagakerjaan (*Inaugural Women's Economic Equality Taskforce to Meet for the First Time _ Ministers Media Centre*, 2022).

Pada 25 November 2022, Pemerintahan Albanese menindaklanjuti komitmen terhadap pengesahan UU *Respect at Work*. UU ini membawa perubahan signifikan yang akan membuat tempat kerja Australia lebih ramah dan aman bagi wanita (McManus, 2022). Kemudian di tahun 2023 ini, Albanese telah melakukan rencana Program Pathway to Politics for Women agar bisa menjadi agenda nasional. Program ini adalah program untuk mengadvokasikan agar Wanita dapat lebih unggul dan maju dalam politik sehingga diharapkan Wanita dan pria dapat bekerja sama dalam agenda Politik Australia, dan kemudian terciptalah kesetaraan gender (University of Melbourne, 2023). Untuk mengaitkan Model Sistem Politik ala David Easton dengan problem kesetaraan gender di Australia, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagam Model Sistem Politik David Easton Apabila Diterapkan dalam Studi Kasus Strategi Women Friendly Policy oleh Anthony Albanese



Sumber: Diolah dari berbagai macam sumber

1.4 Hipotesa

Untuk menghadapi situasi ketidaksetaraan gender, maka kabinet Anthony Albanese menerapkan *Women Friendly Policy* yang berupa:

1. Politik Luar Negeri

- a) Perluasan Kepemimpinan Perempuan dan Memerangi Kekerasan Perempuan berbasis gender di Papua Nugini
- b) Program *Indo-Pacific Center for Health Security*
- c) Penunjukan Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender

2. Politik Dalam Negeri:

- a) Pengangkatan sepuluh Menteri Perempuan dalam Kabinet Anthony Albanese
- b) Pembentukan *Women Economic Equality Taskforce*
- c) Program *Pathway to Politics for Women*
- d) Penindaklanjutan RUU *Respect@Work*
- e) *Cheaper Childcare Policy*

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu membahas secara ilmiah tentang bagaimana kebijakan *women friendly policy* di Australia dibawah pemerintahan Anthony Albanese, menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa yang ditemukan, dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui sumber dari buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah. Menurut Creswell (2008) Metode kualitatif merupakan cara yang digunakan untuk menulis suatu penelitian dengan mengamati

fenomena atau peristiwa yang akan diteliti. Metode kualitatif juga lebih berfokus pada elemen manusia atau perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang dihasilkan dari suatu kebijakan atau norma. Hal inilah yang membedakan dengan metode kuantitatif yang lebih mengandalkan perhitungan menggunakan statistik (Syafnidawaty, 2020). Untuk teknik pengumpulan data digunakan teknik berupa pengumpulan segala informasi melalui studi pustaka atau *library research*.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi tiga bab sebagai berikut :

BAB I: berisi Pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: dalam bab ini akan lebih mengeksplor latar belakang masalah pada bab sebelumnya. Dimana penulis akan membahas mengenai apa saja tantangan yang dihadapi Australia dalam menerapkan *women friendly policy* dibantu dengan hipotesa yang sudah diajukan serta kerangka pemikiran yang digunakan.

BAB III: bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari berbagai temuan dalam analisa yang telah penulis lakukan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan.